



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

# RENSTRA

**Rencana Strategis**  
**DPMPPTSP**  
**Kota Prabumulih**  
**2018 - 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02**  
**Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur**  
**Kota Prabumulih Kode Pos 31111**  
**Telp/Fax : (0713) 3310251**



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota  
Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251  
website : [dpmptsp.kotaprabumulih.go.id](http://dpmptsp.kotaprabumulih.go.id) Email : [dpmptsp@kotaprabumulih.go.id](mailto:dpmptsp@kotaprabumulih.go.id) SMS Center : 0823 80017655

---

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PRABUMULIH NOMOR : 016.a/KPTS/DPMPPTSP-I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTU KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 030/KPTS/DPMPPTSP/2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018-2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Walikota Prabumulih Nomor: 050/475/Bappeda/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Revisi Renstra OPD perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa sesuai Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Nomor : 050/865/Bappeda/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Revisi Renstra OPD perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;
  - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih tentang Perubahan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor: 030 / KPTS / DPMPTSP / 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH NOMOR: 030/KPTS/DPMPSTP/2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018- 2023.

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018- 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018- 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Prabumulih  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS,



A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kemudahan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih untuk periode 2018-2023. Dengan RENSTRA ini akan mempermudah dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang arah keberhasilan dari target kinerja melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu: **“PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS TAHUN 2023”**, khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA di Kota Prabumulih.

Dalam proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih, selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran aparaturnya DPMPTSP Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Prabumulih.

Prabumulih, 24 Maret 2022

KERALA DINAS  
PEMERINTAH KOTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
PRABUMULIH



A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Prabumulih .....	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih.....	31
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih .....	35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>42</b>
3.1 Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih .....	42
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	42
3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	51
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih .....	55
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan .....	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf .....	13
Tabel 2.5	Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan dan Bidang .....	13
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Tabel 2.7	<i>Flow Chart</i> SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) .....	16
Tabel 2.8	Daftar Nama Barang/Aset DPMPTSP Kota Prabumulih .....	17
Tabel TC. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih .....	21
Tabel TC. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2014-2018 .....	23
Tabel 2.9	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih .....	33
Tabel 2.10	Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	34
Tabel 2.11	Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2020 .....	36
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 .....	43
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 .....	44
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	47
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	49
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Anallisi KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	50
Tabel 3.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis .....	52
Tabel 3.7	Nilai Skala Kriteria .....	52
Tabel 3.8	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis .....	54
Tabel TC. 25	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih .....	56
Tabel TC. 26	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	58
Tabel TC. 27a	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kota Prabumulih .....	60
Tabel TC. 27b	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kota Prabumulih .....	71
Tabel TC. 27c	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kota Prabumulih .....	79
Tabel TC. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 86/2017 tersebut, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi penting dan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana Renstra OPD menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dan mengikuti panduan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Renstra DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2018- 2023 ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengembangan potensi wilayah dan sumber daya yang lebih terarah, melalui kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan misi keempat dari Walikota terpilih 2018-2013 dengan meningkatkan penanaman modal daerah melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan sesuai prosedur (SOP).

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2015 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
17. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih;
19. Surat Walikota Prabumulih Nomor 050/475/Bappeda/2020 Tanggal 21 September Tentang Revisi Rencana Strategis OPD.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman dalam membangun komitmen untuk mewujudkan visi misi DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan pada visi misi Walikota Prabumulih.

Tujuan penyusunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Non Perizinan;
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rerja) OPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih;
3. Menjadi tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP**

Memuat tugas dan fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, SOP penyusunan Renstra, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada DPMPTSP, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tujuan dan sasaran kota Prabumulih, telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaah rencana tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis, penentuan dan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tentang, Tujuan dan Sasaran DPMPTSP lima tahun ke depan.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan tentang indikator kinerja DPMPTSP

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

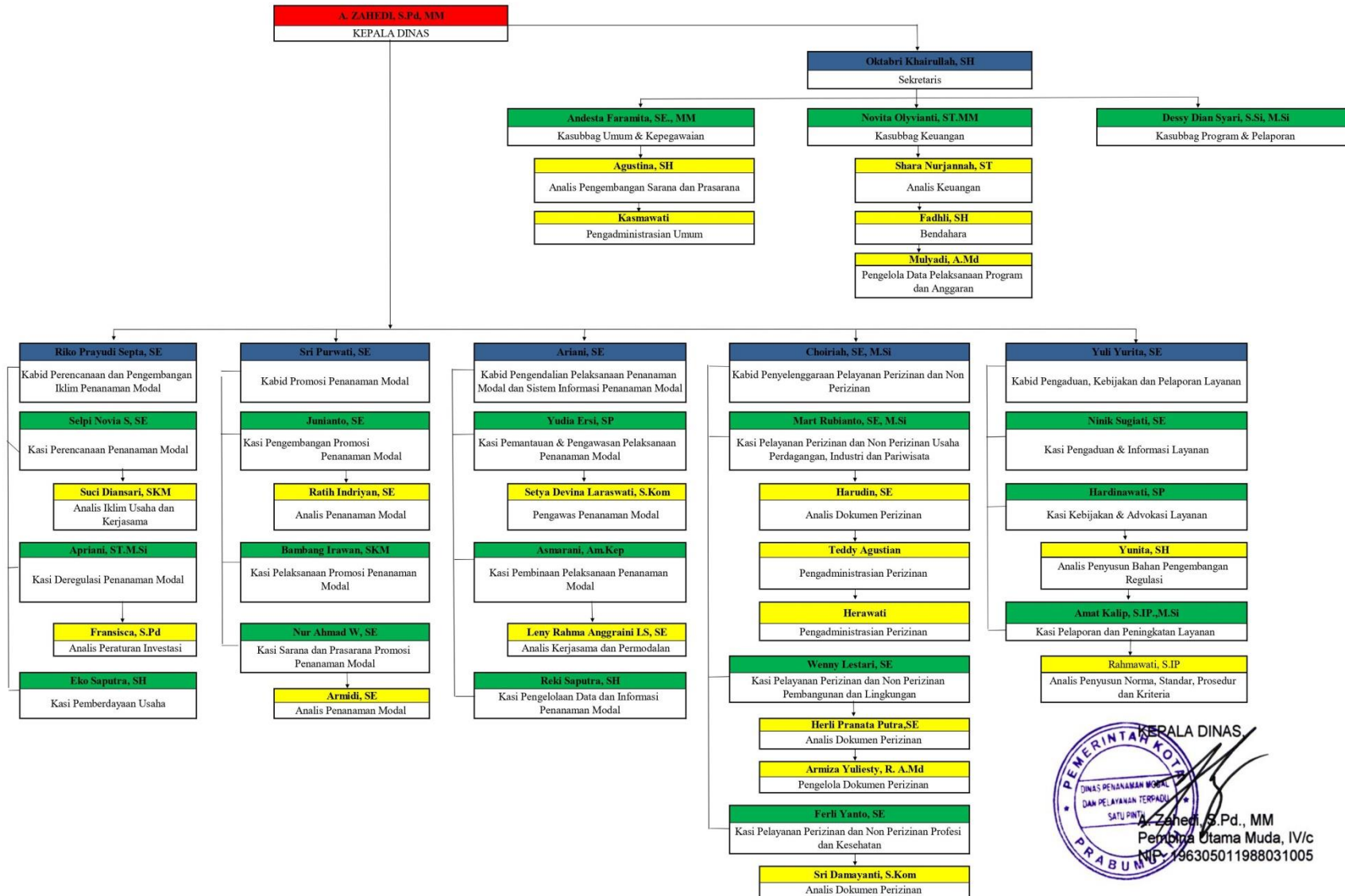
- a. Penyelenggaraan program dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan prosedur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan penyederhanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan kerja dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Program dan Pelaporan

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
  - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal
  - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
  - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal,  
membawahi:
  - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal
  - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Profesi dan Kesehatan.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
  - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
  - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH**



KEPALA DINAS  
 A. Zahedi, S.Pd., MM  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196305011988031005

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya. Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, urusan keuangan, program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.

### **2.1.3 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas DPMPSTP, merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi Kewenangan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
- b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal
- c. Seksi Pemberdayaan Usaha.

#### **2.1.4 Bidang Promosi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Promosi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, Membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
- b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

#### **2.1.5 Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi

kewenangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:

- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

#### **2.1.6 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala DPMPSTP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan; melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata

- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal
- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan.

### **2.1.7 Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan**

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif
- d. Pelaksanaan tugas lain yang berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
- b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
- c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.1** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S-2)	6	8	14
2.	Strata 1 (S-1)	12	22	34
3.	Sarjana Muda / D3	1	2	3
4.	SLTA/SMK/KPPA	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

### 2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

**Tabel 2.2** Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2020

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	17
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	3
3.	SPAMEN/DIKLATPIM TK I	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 2.3** Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	I	-	-	-
2.	II	1	2	3
3.	III	15	28	43
4.	IV	4	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

## 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

**Tabel 2.4** Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2020

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	2	4	6
3.	Eselon IV	7	11	18
4.	Fungsional	-	-	-
5.	Staf	10	19	29
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

## 2.2.5 Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan dan Bidang

**Tabel 2.5** Jumlah Personil Masing-Masing Jabatan dan Bidang

No.	Jabatan/Bidang	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah (Orang)
		IV	III	II	I	IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1								1
2.	Sekretaris Dinas	1								1
3.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian					1				1
4.	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian	1				3				4
5.	Kasubbag Keuangan					1				1
6.	Staf Keuangan		2			3				5
7.	Kasubbag Program dan Pelaporan					1				1
8.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		1							1
9.	Kepala Seksi		1			1	1			3
10.	Staf Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal					3				3
11.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal					1				1

12	Kepala Seksi		2				1			3
13	Staf Promosi Penanaman Modal						3			3
14	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal						1			1
15	Kepala Seksi		1				2			3
16	Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal		1				2			3
17	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan					1				1
18	Kepala Seksi	1	1				1			3
19	Staf		3	1			1	2		7
20	Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan						1			1
21	Kepala Seksi		1				2			3
22	Staf Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan		1				2			3
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>2</b>		<b>54</b>

Sumber: DUK DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

## 2.2.6 Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan








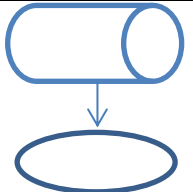
**Tabel 2.6** Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 1 (S-1)	2	4	6
2.	Sarjana Muda / D3	-	5	5
4	Sarjana Muda / D2	-	1	1
3.	SLTA/SMK/KPPA	3	5	8
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Sumber: DUK DPMPSTSP Kota Prabumulih Per Oktober 2020

Adapun Tata Laksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, dapat dilihat dari Proses, Prosedur dan Mekanisme Tata Laksana (*Flow Chart* atau Diagram Alur Kerja ) dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.7 Flow Chart SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renstra OPD						Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renstra	
2	Menganalisis data dan informasi Renstra yang telah terkumpul						Komputer/ Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan Renstra	
3	Membuat konsep rencana strategis (Renstra) OPD						RKPD, IKU, IKK, Komputer	10 hari	Draft Renstra	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana strategis (Renstra)						RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renstra	
5	Menyampaikan dokumen rencana strategis kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan						Draft Renstra	2 hari	Draft Renstra	
6	Penandatanganan dokumen rencana strategis oleh Kepala Dinas						Draft Renstra	2 hari	Draf Renstra	
7	Penggandaan dan Pengiriman Renstra OPD						Biaya pengandaan, ATK	1 hari	Dokumen Renstra	
8	Pengarsipan						lemari arsip	1 hari	Arsip Renstra	

## 2.2.7 Aset

Adapun Aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Daftar Nama Barang/Aset DPMPSTSP Kota Prabumulih

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4 (Toyota/Kijang ,Kijang Innova, Avanza)	2
2.	Kendaraan Roda 2 (Yamaha)	5
3.	Alat Ukur Universal ( <i>Global Positioning System</i> )	1
4.	Alat Ukur/Perbandingan ( <i>Air Conditioning Unit</i> )	4
5.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
6.	Mesin Ketik Manual <i>Longewagen</i> (18)	1
7.	Lemari Besi	1
8.	Filling Besi/Metal	1
9.	<i>Brankas</i>	1
10.	Rak Buku	8
11.	Papan Nama Instansi	1
12.	Alat Kantor Lainnya	3
13.	Lemari Kayu	2
14.	Meja Rapat	1
15.	Meja Tulis	12
16.	Meja Panjang	4
17.	Meja Bundar	1
18.	Kursi Rapat	15
19.	Kursi Putar	14
20.	Kursi Lipat	57
21.	Meja Komputer	6
22.	Meja Biro	10
23.	Sofa	2
24.	Gorden/Hordeng	8
25.	Lemari Arsip	3
26.	Rak Televisi	1
27.	Kursi Tunggu/Panjang	4
28.	Alat Pengukur Waktu Lain-Lain	2
29.	AC Unit	26
30.	AC Split	2
31.	Kipas Angin	4
32.	<i>Exhause Fan</i>	6
33.	Televisi	1
34.	<i>Wireless</i>	1
35.	<i>Unit Power Supply</i>	10
36.	<i>Dispenser</i>	1

No	Jenis Barang	Jumlah
37.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
38.	Generator Listrik	1
39.	P.C Unit	23
40.	Laptop	13
41.	<i>Hard Disk</i>	1
42.	<i>Printer</i>	24
43.	<i>Scanner</i>	1
44.	UPS	1
45.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
46.	Peralatan Jaringan	1
47.	Modem	1
48.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	11
49.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1
50.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	2
51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6
53.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	19
54.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7
55.	<i>Camera + Attachment</i>	1
56.	<i>Facsimile</i>	2
57.	<i>Stabilizer</i>	3
58.	Proyektor	1
59.	CCTV	1

Sumber: Kartu Inventaris Barang Milik DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

### 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan dinas yang mempunyai tugas di bidang menyelenggarakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan dalam satu pintu.

Untuk meningkatkan dan menarik para investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya dilaksanakan berbagai upaya antara lain:

1. Promosi lewat pameran investasi baik pameran tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
2. Menyusun profil investasi.
3. Menyediakan informasi peluang usaha dan peluang investasi penanaman modal.
4. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dan UMKM untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan promosi usaha maupun peluang penanaman modal.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan juga telah diadakan kegiatan dan terobosan antara lain;

1. Membangun dan menerapkan sistem aplikasi perizinan secara online.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
3. Menempatkan Tim Teknis di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih dengan Tim Teknis disetiap OPD yang ada sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi OPD teknis untuk memperoleh rekomendasi perizinan dan non perizinan
4. Sebagai tindak lanjut peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka berdasarkan Peraturan Walikota No. 52 tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih, sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sebanyak 83 Perizinan dan Non Perizinan.

Anggaran dan pendanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2015 s.d 2018 masih terbatas sehingga masih memprioritaskan kegiatan yang utama saja.

Target indikator kinerja yang menonjol adalah:

1. Persentase Rata-Rata Hasil Pencapaian Program dan Kegiatan pada DPMPTSP Kota Prabumulih dari Tahun 2014 s.d 2018 :
  - Tahun 2014 = 94,73%
  - Tahun 2015 = 94,58%
  - Tahun 2016 = 98,58%
  - Tahun 2017 = 92,12%
  - Tahun 2018 = 99%
2. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penggunaan layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih dari Tahun 2014 s.d 2018:
  - Tahun 2014 = 74,43
  - Tahun 2015 = 81,11
  - Tahun 2016 = 81,07
  - Tahun 2017 = 81,96
  - Tahun 2018 = 80,89
3. Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menginvestasikan modalnya di Kota Prabumulih, dari Tahun 2014 s.d 2018, adalah sebagai berikut:
  - Tahun 2014 = 0
  - Tahun 2015 = 1 perusahaan
  - Tahun 2016 = 24 perusahaan
  - Tahun 2017 = 5 perusahaan
  - Tahun 2018 = 22 perusahaan
4. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang berinvestasi di Kota Prabumulih dari Tahun 2014 s.d 2018, adalah sebagai berikut:

Hal ini dapat digambarkan melalui indikator kinerja sebagaimana tabel TC.23 dan Tabel TC.24

- Tahun 2014 = 0
- Tahun 2015 = 0
- Tahun 2016 = 0
- Tahun 2017 = Rp. 2.500.000.000,-
- Tahun 2018 = Rp. 26.000.000.000,-

**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih**

**Tabel TC 2.3**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Target dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase rata-rata hasil pencapaian pogram dan kegiatan pada DPMPSTSP Kota Prabumulih		100%		100%	100%	100%	100%	100%	94,86%	94,73%	98,58%	92,12%	99%	94,86%	94,73%	98,58%	92,12%	99%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		75		74,43	81,11	81,07	81,96	80,89	74,43	81,11	81,07	81,96	81,6	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah PMDN		25		-	1	24	5	22	-	1	24	5	22	-	100%	100%	100%	100%
4	Realisasi Investasi		2,5		-	-	-	Rp 2,5M	Rp 26M	-	-	-	Rp 2,5M	Rp 26M	-	-	-	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP diantaranya meningkatnya Pelayanan Perizinan secara efektif, Penyelesaian proses perizinan dan Survey Kepuasan Masyarakat yang sesuai dengan target yang dibuat dalam IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTSP Tahun 2014-2018**

**Tabel T.C 24**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN				
				2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	ANGGARAN	REALISASI			
				1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terpenuhi a Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas berserta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksana Pelayanan	<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																				
		<b>A</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	5,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	5,248,000	3,919,500	5,000,000	4,530,000	100.00	99.96	78.39	100.00	90.60			6,062,500	5,674,375	
		<b>B</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi,air dan listrik	135,000,000	142,600,000	90,000,000	86,799,200	94,800,000	113,664,334	135,947,114	81,416,352	85,172,108	77,456,914	84.20	95.33	90.46	98.13	81.71			137,299,800	123,414,206	
		<b>C</b>	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	15,000,000	-																		
		<b>D</b>	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33,150,000	13,800,000	22,800,000	22,800,000	51,700,000	30,100,000	13,800,000	22,800,000	22,800,000	43,700,000	90.80	100.00	100.00	100.00	84.53			36,062,500	33,300,000	
		<b>E</b>	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,400,000	17,600,000	25,200,000	27,000,000	33,900,000	12,900,000	17,599,970	25,197,000	27,000,000	31,748,500	74.14	100.00	99.99	100.00	93.65			30,275,000	28,611,368	
		<b>F</b>	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000	70,000,000	70,000,000	68,000,000	60,000,000	59,987,000	69,968,500	69,872,500	68,000,000	55,020,000	99.98	99.96	99.82	100.00	91.70			82,000,000	80,712,000	
		<b>G</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32,000,000	26,000,000	30,600,000	37,750,000	50,000,000	32,000,000	26,000,000	24,442,000	37,750,000	34,916,500	100.00	100.00	79.88	100.00	69.83			44,087,500	38,777,125	
		<b>H</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan bangunan kantor	5,000,000	10,000,000	5,000,000	5,800,000	6,000,000	4,981,000	8,404,500	4,982,000	5,800,000	5,258,000	99.62	84.05	99.64	100.00	87.63			7,950,000	7,356,375	
		<b>I</b>	Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000	30,000,000	30,000,000	25,600,000	34,290,000	19,032,500	28,485,000	28,158,000	25,600,000	31,202,000	95.16	94.95	93.86	100.00	90.99			34,972,500	33,119,375	
		<b>J</b>	Penyediaan Jasa Media Informasi	10,000,000	9,080,000	-	4,000,000		9,100,000	8,950,000	-	4,000,000	-	91.00	98.57	-	100.00					5,770,000	5,512,500
<b>K</b>	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkant oran	-	23,200,000	22,600,000	22,600,000		-	23,160,000	22,600,000	21,800,000	-	-	99.83	100.00	96.46					17,100,000	16,890,000		

		L	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	60,000,000	5,000,000	-	-	-	54,843,647	1,392,726				91.41	27.85	16,250,000	14,059,093
		M	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	15,000,000	17,000,000	-	-	-	15,000,000	15,585,000				100.00	91.68	8,000,000	7,646,250
		N	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	-	-	275,000,000	350,000,000	-	-	-	274,997,766	331,497,723				100.00	94.71	156,250,000	151,623,872
		O	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	-	-	20,000,000	26,000,000	-	-	-	20,000,000	26,000,000				100.00	100.00	11,500,000	11,500,000
		2	<b>Program Peningkatan Disiplin Pegawai</b>																	
		A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	5,000,000	57,765,000			-	42,800,000	54,215,000			-	856.00	93.85			15,691,250	24,253,750
		B	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	15,000,000	17,235,000	18,000,000	20,000,000	-	15,000,000	17,185,000	18,000,000	20,000,000	-	100.00	99.71	100.00	100.00	17,558,750	17,546,250
		3	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
		A	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	70,000,000	-	-	294,370,000		66,812,000	-	-	294,370,000		95.45	-	-	100.00		91,092,500	90,295,500
		B	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	161,200,000	11,000,000	63,000,000	-	80,800,000	159,160,000	11,000,000	61,800,000	-		98.73	100.00	98.10	-	-	58,800,000	57,990,000
		C	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	27,500,000	25,000,000	28,000,000	25,000,000	25,000,000	27,492,000	24,868,000	28,000,000	18,500,000	100.00	99.97	99.47	100.00	74.00	32,625,000	30,965,000
		D	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Hardware/Jaringan Komputer	24,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	27,300,000	24,000,000	24,600,000	24,600,000	29,400,000	18,200,000	100.00	98.40	98.40	98.00	66.67	32,825,000	30,200,000
		E	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	-			77,000,000	14,950,000	-			65,016,501	99.67	-				3,750,000	3,737,500
		F	Pembangunan Taman dan Nama Gedung Kantor	25,000,000	-				24,708,000	-				98.83	-				6,250,000	6,177,000

		<b>G</b>	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan			64,000,000		64,000,000			61,800,000			43,700,000			96.56		68.28	32,000,000	26,375,000
		<b>H</b>	Tersedianya Website DPMPPTSP	-	-	-	50,000,000		-	-	-	50,000,000		-	-	-	100.00			12,500,000	12,500,000
Terlaksananya SOP dibidang Pelayanan Perizinan	Prosedur Pelayanan Perizinan sesuai dengan SOP	<b>4</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>																		
		<b>A</b>	Penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal	-	-	35,000,000	35,000,000		-	-	31,940,000	34,975,650		-	-	91.26	99.93			17,500,000	16,728,913
		<b>B</b>	Fasilitasi Pelayanan pengaduan pelanggan masyarakat	-	-	15,000,000	15,000,000		-	-	15,000,000	15,000,000		-	-	100.00				7,500,000	7,500,000
		<b>C</b>	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	60,000,000	50,000,000		-	-	59,080,000	50,000,000		-	-	98.47	100.00			27,500,000	27,270,000
		<b>D</b>	Sosialisasi SOP Perizinan di 6 Kecamatan se Kota Prabumulih				150,000,000					150,000,000					100.00			37,500,000	37,500,000
		<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>																		
		<b>A</b>	Fasilitasi Operasional Tim Pembina	50,300,000	55,000,000				45,200,000	47,800,000				89.86	86.91					26,325,000	23,250,000
		<b>B</b>	Fasilitasi Operasional Tim Teknis	46,100,000	30,000,000				46,100,000	30,000,000				100.00	100.00					19,025,000	19,025,000
Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi yang didukung dengan Pemahaman dan Kesadaran dalam Pengurusan Perizinan	Jumlah perusahaan yang berinvestasi dilengkapi dengan perizinan	<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>																		
		<b>A</b>	Peningkatan Monitoring Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	10,000,000	15,000,000	15,000,000		-	10,000,000	15,000,000	15,000,000		-	100.00	100.00	100.00			10,000,000	10,000,000
		<b>B</b>	Penyelenggaraan Pameran Investasi	-	90,000,000	85,000,000	85,880,800		-	72,381,271	84,183,100	85,880,800		-	80.42	99.04	100.00			65,220,200	60,611,293

		C	Pembuatan /Pencetakan Booklet dan Leaflet	-	30,000,000	0	15,000,000		-	30,000,000	0	15,000,000		-	100.00	0	100.00		11,250,000	11,250,000	
		D	Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	10,000,000	20,000,000	35,000,000	-	-	9,960,000	20,000,000	35,000,000	-	-	99.60	100.00	100.00		16,250,000	11,250,000
		E	Sosialisasi Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (NPWP)					95,000,000					95,000,000				100.00		23,750,000	16,240,000	
		7	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>																		
		A	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					40,000,000					39,850,000				99.63		10,000,000	9,962,500	
		B	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal					50,000,000					49,600,000				99.20		12,500,000	12,400,000	
		C	Kajian Kemudahan Penanaman Modal					20,000,000					20,000,000				100.00		5,000,000	5,000,000	
		8	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>																		
		A	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	55,000,000	60,000,000				55,000,000	59,592,700					100.00	99.32			28,750,000	28,648,175	
		9	<b>Program Penataa Peraturan Perundang-Undangan</b>																		
		A	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	-	55,160,000				-	55,160,000					-	100.00			13,790,000	13,790,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan	Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat	10	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		
		A	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000	2,750,000	3,200,000	6,000,000		2,500,000	2,750,000	3,200,000	5,200,000			100.00	100.00	100.00	86.67	3,612,500	3,412,500	

		<b>B</b>	Penyusunan RKA SKPD	2,500,000	2,750,000	3,200,000	5,000,000		2,500,000	2,750,000	3,200,000	4,600,000		100.00	100.00	100.00	92.00		3,362,500	3,262,500
		<b>C</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000	2,750,000	3,200,000	5,000,000		2,500,000	2,750,000	3,200,000	4,600,000		100.00	100.00	100.00	92.00		3,362,500	3,262,500
		<b>D</b>	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	-	-	3,200,000	5,000,000	5,000,000			3,200,000	4,600,000	5,000,000			100.00	92.00	100.00	3,300,000	3,200,000
		<b>E</b>	Penyusunan RKA SKPD Perubahan	-	-		5,000,000	5,000,000				4,600,000	5,000,000					100.00	2,500,000	2,400,000
		<b>F</b>	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD				5,000,000	5,000,000				4,600,000	5,000,000					100.00	2,500,000	2,400,000
		<b>G</b>	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	-	-		5,000,000	5,000,000				4,600,000	5,000,000					100.00	2,500,000	2,400,000
		<b>H</b>	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100.00	1,250,000	1,250,000
		<b>I</b>	Penyusunan Renstra OPD	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
		<b>J</b>	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		<b>K</b>	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	13,685,000	-	-	-	-	68.43	5,000,000	-
		<b>L</b>	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	180,000,000	122,597,000	180,000,000			179,903,596	120,261,050	178,880,460			99.95	98.09	99.38			120,649,250	119,761,277
		<b>M</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	19,920,000	19,000,000	15,000,000		17,470,000	19,010,000	17,550,000	15,000,000		87.35	95.43	92.37	100.00		18,480,000	17,257,500
		<b>N</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000		1,000,000	48,042,000	47,646,931	54,843,647		100.00	80.07	79.41	91.41		45,250,000	37,883,145
		<b>O</b>	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tingkat disiplin kinerja daya saing dan pengetahuan serta keahlian aparaturnya penyelenggara pelayanan perizinan	<b>11</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
		<b>A</b>	Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur	33,000,000	52,203,000	45,000,000	45,000,000		33,000,000	52,203,000	44,144,000	45,000,000		100.00	100.00	98.10	100.00		43,800,750	43,586,750
		<b>B</b>	Pembinaan Aparatur di Bidang Perizinan	-	65,000,000	60,000,000	60,000,000	50,000,000	-	63,789,850	59,850,000	60,000,000	42,900,000	-	98.14	99.75	100.00	85.80	58,750,000	56,634,963
		<b>C</b>	Rapat Koordinasi SOP dan Persyaratan Perizinan	-	-	-	-	50,810,000	-	-	-	-	50,810,000	-	-	-	-	100.00	12,702,500	12,702,500
		<b>D</b>	Pendidikan dan Pelatihan Formal	122,000,000	50,000,000	-			121,075,000	47,000,000	-			99.24	94.00	-			43,000,000	42,018,750

## **2.3.1 Akuntabilitas Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2014-2018**

### **2.3.1.1 Anggaran Tahun 2014**

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp3.135.547.403,-** (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp2.762.577.237,-** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) dengan sisa Anggaran Sebesar **Rp372.970.166,-** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) :

#### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp1.655.933.807,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah).

#### **b. Belanja Langsung**

Belanja langsung meliputi belanja modal dengan anggaran sebesar Rp1.166.650.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.106.643.430,- (Satu Milyar Seratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp60.006.570,- (Enam Puluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

### **2.3.1.2 Anggaran Tahun 2015**

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp3.367.974.409,-** (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*).

dengan realisasi sebesar **Rp3.267.624.613,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah*) dengan sisa Anggaran Sebesar **Rp100.349.796,-** (*Seratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

#### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp2.140.974.409,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.105.242.658,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Empat

Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan sisa anggaran Rp35.731.751,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

**b. Belanja Langsung**

Belanja langsung meliputi belanja modal dengan anggaran sebesar Rp1.227.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.162.381.955,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp64.618.045,- (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)

**2.3.1.3 Anggaran Tahun 2016**

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar Rp3.348.532.177,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.301.120.962,- (Tiga Milyar Tiga ratus satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp47.411.215,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus sebelas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp2.198.532.177,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.193.181.119,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Seratus Delapan Puluh Satu Seratus Sembilan Belas Rupiah) dengan sisa anggaran Rp5.351.058,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

**b. Belanja Langsung**

Belanja langsung meliputi belanja modal dengan anggaran sebesar Rp1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.107.939.843,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp42.060.157,- (Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

**2.3.1.4 Anggaran Tahun 2017**

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Prabumulih dengan

Anggaran Setelah Perubahan Sebesar Rp3.880.739.143,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

dengan raelisasi sebesar Rp3.861.398.885,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp19.340.258,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp2.444.489.143,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.432.669.414,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua enam Ratus Enam Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Belas Rupiah)dengan sisa anggaran Rp11.819.729,-(Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

**b. Belanja Langsung**

Belanja langsung meliputi belanja modal dengan angggaran sebesar Rp1.681.600.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.670.079.471,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp11.520.529,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Lima Puluh Sembilan Rupiah).

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih**

### **2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L**

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Selatan.

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia maupun Renstra Propinsi Sumatera Selatan.

Program-program tersebut dilaksanakan sebagai upaya nyata perbaikan kualitas dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Adapun persoalan-persoalan mengenai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal yang mendapat perhatian ekstra dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia antara lain Peningkatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Dan untuk percepatan Pelaksanaan Berusaha maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS) dimana dengan diterapkannya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha tanpa memakan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit.

#### **2.4.2 Analisis Terhadap Renstra Provinsi Sumatera Selatan**

Adapun RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan 16 Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan diantara Maju Investasi, Industri dan Perdagangan serta Maju Pelayanan Publik Berkualitas yang berhubungan dengan 32 sasaran RPJMD Kota Prabumulih yaitu Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah serta Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan serta Penanaman Modal di daerah mendukung upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan meningkatkan pelayanan perizinan/non perizinan serta Penanaman Modal dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.

**Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih**

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih.	Program Peningkatan Pengembangan Pemukiman dan perumahan rakyat	Meningkatnya perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meningkat
2	Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran Pemerintah terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih dan Perkantoran Swasta terkonsentrasi di Jln. Jend. Sudirman	Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)	Untuk mendukung kawasan pembangunan pusat perkantoran di kawasan Kelurahan Sindur	Promosi untuk para investor yang akan membangun kawasan pusat perkantoran.
3	Kawasan Jasa dan Perdagangan	Tersebar di seluruh wilayah Kota Prabumulih	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian di Kota Prabumulih	Peningkatan Investor di bidang Jasa maupun Perdagangan di Kota Prabumulih	Promosi kawasan pengembangan Jasa dan Perdagangan
4	Kawasan Industri	Berada di Kelurahan Prabumulih Barat	Peningkatan dari Home Industri menjadi Industri Berskala Besar.	Peningkatan Jumlah Industri berskala besar	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan industri
5	Kawasan Fasilitas Umum	Berada di Pusat Kota dan diarah Jalan Lingkar Timur	Peningkatan dan Pengembangan kawasan jalan lingkar timur	Peningkatan jumlah fasilitas umum di wilayah pengembangan kawasan di lingkar timur	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan Fasilitas Umum

**Tabel 2.10 Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Prabumulih**

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan BP3MD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas	Lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan di sektor industri mempunyai dampak dan risiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Investasi yang direalisasikan di Kota Prabumulih diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Lebih memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Perlu kehati-hatian dalam menggali potensi dan peluang di dibidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus dipilih yang memiliki dampak yang kecil terhadap kerusakan lingkungan

Pada saat ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas, oleh karena itu DPMPSTSP Kota Prabumulih lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pembangunan.

Pembangunan, terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup. Kita harus hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor, diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup.

Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh, potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem. Harus memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri.

Pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit. Oleh karena itu, promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan. Kita perlu berhati-hati dalam menggali potensi dan peluang di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis.

Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.

## **2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

### **2.5.1 Tantangan**

Tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Untuk pelimpahan/pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan, masih terdapat OPD yang belum menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada DPMPSTSP Kota Prabumulih, sehingga Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan masih belum optimal dilaksanakan.
2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur DPMPSTSP Kota Prabumulih perlu ditingkatkan agar di dalam pelaksanaan pelayanan dapat optimal.
3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan masih kurang memadai sehingga belum optimal.

4. Belum efektifnya kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk menarik para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Prabumulih.
5. Belum optimalnya penggalan potensi-potensi unggulan yang tersedia untuk ditawarkan kepada calon investor untuk meningkatkan perkembangan perekonomian rakyat.
6. Anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk menunjang DPMPTSP Kota Prabumulih di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
7. Belum maksimalnya pemetaan potensi-potensi perkecamatan yang ada di Kota Prabumulih , sehingga potensi daerah belum optimal.

### **2.5.2 Peluang**

1. Tersediannya dasar hukum dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan perizinan.
2. Letak Geografis Kota Prabumulih yang merupakan Kota Perlintasan dari Kabupaten/Kota yang menghubungkan dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, yang jarak tempuhnya 83 km, sehingga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang melalui Kota Prabumulih
3. Terdapat potensi dan sumber daya yang masih belum dikembangkan.
4. Meningkatnya infrastruktur di Kota Prabumulih sehingga dapat meningkatkan investor untuk menanamkan modalnya.
5. Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk dibidang industri.
6. Masih tersedianya kawasan untuk industri.
7. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
8. Upah minimum regional yang cukup bersaing dengan wilayah Kabupaten/Kota lain.
9. Berkembangnya tekonologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat untuk membuka mengembangkan peluang berinovasi bagi DPMPTSP untuk promosi, pengembangan pelayanan perizinan terpadu yang lebih mudah, cepat, efektif dan efisien.

Adapun macam dan Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dari 131 Perizinan dan Non Perizinan berubah menjadi 109 Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Perwako Nomor 35 Tahun 2020, yaitu:

**Tabel 2.11 Rekapitulasi Perizinan Dan Non Perizinan DPMPSTSP Tahun 2020**

No.	Nama Izin/Non Izin	Sektor	OSS / Non OSS	Biaya	SOP/ Hari
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Pekerjaan Umum	Non OSS	Retribusi	14
2	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Pekerjaan Umum	OSS	Retribusi	3
3	Izin Reklame	Pekerjaan Umum	Non OSS	Retribusi	10
4	Izin Lokasi	Pekerjaan Umum	OSS	Gratis	14
5	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)	Pekerjaan Umum	Non OSS	Gratis	14
6	Izin Pembuangan Air Limbah	Lingkungan	OSS	Gratis	62
7	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lingkungan	OSS	Gratis	35
8	Izin Lingkungan	Lingkungan	OSS	Gratis	110
9	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Aplikasi Lahan	Lingkungan	OSS	Gratis	27
10	Izin pembuangan Air Limbah Domestik	Lingkungan	OSS	Gratis	32
11	Izin Pendirian dan Operasional Panti	Sosial	Non OSS	Gratis	7
12	Izin Pendirian dan Operasional Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Sosial	Non OSS	Gratis	7
13	izin Usaha Peternakan	Peternakan	OSS	Gratis	20
14	Izin Usaha Pemotongan Ternak	Peternakan	OSS	Gratis	14
15	Izin Perluasan Usaha Peternakan	Peternakan	OSS	Gratis	7
16	Izin Petshop	Peternakan	OSS	Gratis	10
17	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi dan UKM	OSS	Gratis	7
18	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Koperasi dan UKM	OSS	Gratis	7
19	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Koperasi dan UKM	OSS	Gratis	3
20	Izin Praktek (SIP) Dokter Umum	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
21	Izin Praktek Dokter Gigi	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
22	Izin Praktek Dokter Spesialis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
23	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
24	Izin Praktek Psikologi Klinis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
25	Izin Praktek Perawat Umum	Kesehatan	Non OSS	Gratis	4
26	Izin Praktek Perawat Gigi	Kesehatan	Non OSS	Gratis	4
27	Izin Praktek Perawat Anathesis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
28	Izin Praktek Bidan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	4
29	Izin Praktek Apoteker	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
30	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
31	Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
32	Izin Praktek Tenaga Promosi dan Ilmu Prilaku	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5

33	Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
34	Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
35	Izin Praktek Tenaga Biostatistik Kesehatan dan Kependudukan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
36	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
37	Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
38	Izin Praktek Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
39	Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
40	Izin Praktek Tenaga Gizi Nutrisisionis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
41	Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
42	Izin Praktek Fisioterapis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
43	Izin Praktek Okupasi Terapis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
44	Izin Praktek Terapis Wicara	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
45	Izin Praktek Akupuntur	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
46	Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
47	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
48	Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
49	Izin Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
50	Izin Praktek Teknisi Gigi	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
51	Izin Praktek Perawat/Penata Anesthesi	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
52	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
53	Izin Praktek Audiologis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
54	Izin Praktek Radiografer	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
55	Izin Praktek Elektromedis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
56	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
57	Izin Praktek Fisikiawan Medik	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
58	Izin Praktek Radioterapis	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
59	Izin Praktek Ortotik Prostetik	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
60	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
61	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
62	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	Kesehatan	OSS	Gratis	14

63	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	Kesehatan	OSS	Gratis	14
64	Izin Operasional Puskesmas	Kesehatan	Non OSS	Gratis	10
65	Izin Mendirikan Klinik	Kesehatan	OSS	Gratis	30
66	Izin Operasional Klinik	Kesehatan	OSS	Gratis	30
67	Izin Apotik	Kesehatan	OSS	Gratis	12
68	Izin Transfusi Darah	Kesehatan	Non OSS	Gratis	10
69	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	OSS	Gratis	10
70	Izin Optikal	Kesehatan	Non OSS	Gratis	7
71	Izin Toko Alat Kesehatan	Kesehatan	OSS	Gratis	10
72	Izin Produksi dan Pembekalan Alat Kesehatan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	10
73	Izin Toko Obat	Kesehatan	OSS	Gratis	7
74	Izin Tukang Gigi	Kesehatan	Non OSS	Gratis	7
75	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK TWA)	Kesehatan	Non OSS	Gratis	7
76	Izin Laboratorium Klinik Umum dan Pratama	Kesehatan	OSS	Gratis	25
77	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Kesehatan	OSS	Gratis	7
78	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perdagangan	OSS	Gratis	3
79	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Perdagangan	OSS	Gratis	1
80	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Perdagangan	OSS	Gratis	3
81	Izin Usaha Industri (IUI)	Perindustrian	OSS	Gratis	7
82	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Kepariwisata	OSS	Gratis	7
83	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Ketenagakerjaan	Non OSS	Gratis	7
84	Izin Trayek Angkutan	Perhubungan	OSS	Retribusi	7
85	Izin Dispensasi Masuk Kota	Perhubungan	Non OSS	Retribusi	5
86	Izin Usaha Angkutan	Perhubungan	OSS	Gratis	7
87	Izin Insidentil	Perhubungan	Non OSS	Retribusi	5
88	Izin Operasi Angkutan	Perhubungan	OSS	Retribusi	5
89	Izin Angkutan Barang Khusus	Perhubungan	Non OSS	Gratis	5
90	Izin Penelitian	Pendidikan	Non OSS	Gratis	2
91	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB, dan TPA)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
92	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB, dan TPA)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
93	Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)	Pendidikan	OSS	Gratis	7

94	Izin Operasional Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
95	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
96	Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
97	Izin Pendirian Sekolah Menengah (SMP)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
98	Izin Operasional Sekolah Menengah (SMP)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
99	Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
100	Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Pendidikan	OSS	Gratis	7
101	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Lingkungan	OSS	Gratis	9
102	Sertifikat <i>Laik Hygiene Damiu/Depot</i> Air Minum Isi Ulang	Kesehatan	OSS	Gratis	7
103	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kesehatan	OSS	Gratis	7
104	Serfikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Kesehatan	OSS	Gratis	5
105	Sertifikat <i>Laik Hygiene</i> Restoran/Rumah Makan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
106	Sertifikat <i>Laik Hygiene</i> Salon Kecantikan	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
107	Sertifikat Jasa Boga	Kesehatan	Non OSS	Gratis	5
108	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Ketenagakerjaan	Non OSS	Gratis	5
109	Kartu Pengawasan Izin Usaha	Perhubungan	Non OSS	Retribusi	5

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP yang selama ini masih dikelola oleh beberapa OPD teknis, dimana selanjutnya Tim Teknis dari masing-masing OPD bersangkutan berada di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan dapat meminta rekomendasi dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh OPD.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi di Kota Prabumulih.

2. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.
3. Masih kurangnya kemampuan sumber daya Aparatur baik dibidang penanaman modal dan bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi.
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan cepat, mudah, murah dan transparan.
2. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/APBN maupun dari Pihak Swasta dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi pelayanan antara lain:

1. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor;
2. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal;
3. Masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA dan PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Belum optimalnya kuantitas promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi;
6. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
7. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang potensial dalam pelayanan perizinan maupun Penanaman Modal.

#### **3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih**

##### **3.2.1 Visi Dan Misi**

Visi Pembangunan Kota Prabumulih tahun 2018-2023 adalah **“KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS TAHUN 2023”**.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Prabumulih tahun 2018-2023 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas, dan Berprestasi;
2. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas, Berprestasi, dan Religius pada setiap lini kehidupan;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

### 3.2.2 Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan Visi Misi Walikota Prabumulih Tahun 2018-2023, maka ditetapkan Tujuan Prioritas dan Sasaran Strategis. Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dan Tujuan Prioritas serta keterkaitan antara Tujuan Prioritas dan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

No.	Misi	Tujuan
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas dan Berprestasi.	1. Mewujudkan Pemerintah Kota Prabumulih yang baik dan berprestasi, baik dari sisi pelaksanaan pemerintahannya maupun dari sisi pelayanan terhadap masyarakat.
2.	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas, Berprestasi, dan Religius pada setiap lini kehidupan.	2. Mewujudkan Masyarakat Kota Prabumulih yang berkualitas dan berprestasi, baik dari sisi kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara serta beragama.
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas.	3. Mewujudkan infrastruktur yang cukup, memadai, baik dan berkualitas yang mampu melampaui standar kebutuhan dasar hidup masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Kota Prabumulih, dan umumnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Kota Prabumulih.
4.	Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.	4. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang terus meningkat, yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sumber: RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan Pemerintah Kota Prabumulih yang baik dan berprestasi, baik dari sisi pelaksanaan pemerintahannya maupun dari sisi pelayanan terhadap masyarakat.	1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabilitas 3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah
2.	Mewujudkan Masyarakat Kota Prabumulih yang berkualitas dan berprestasi, baik dari sisi kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara serta beragama.	1. Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Menurunnya Tingkat Kemiskinan 4. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga 5. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak
3.	Mewujudkan infrastruktur yang cukup, memadai, baik dan berkualitas yang mampu melampaui standar kebutuhan dasar hidup masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Kota Prabumulih, dan umumnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Kota Prabumulih.	1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 2. Meningkatnya Kawasan Rumah Layak Huni 3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang terus meningkat, yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian

Sumber: RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

### 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BKPM-RI serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BKPM-RI maupun Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

#### 3.3.1 Pokok Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan BKPM 2 Tahun 2020 Tentang Renstra BKPM 2020-2024 berikut merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan BKPM RI Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Visi: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**
- Misi: BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
  1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
  2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Tujuan:
  1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
  2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima
- Sasaran Strategis:
  1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
  2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
  3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
- Arah Kebijakan:
  1. Peningkatan inovasi penanaman modal dalam rangka pencapaian target penanaman modal
  2. Peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

### 3.3.2 Pokok Renstra BKPM DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai arahan RPJMD Sumsel Tahun 2019-2023, untuk Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

- Visi: **Sumsel Maju Untuk Semua**
- Misi: DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan misi ke (1) dan misi ke (3) dari misi Gubernur, yaitu:
  1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan
  2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur berintegritas, profesional dan responsif
- Tujuan:
  1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
  2. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran Strategis:
  1. Meningkatnya Investasi, Industri dan perdagangan
  2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas
- Arah Kebijakan:
  1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien

RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan 16 Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan diantara Maju Investasi, Industri dan Perdagangan serta Maju Pelayanan Publik Berkualitas yang berhubungan dengan 32 sasaran RPJMD Kota Prabumulih yaitu Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah serta Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan serta Penanaman Modal di daerah mendukung upaya BKPM RI dan meningkatkan pelayanan perizinan/non perizinan serta Penanaman Modal dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.

Adapun persoalan-persoalan mengenai Pelayanan Perizinan/Non Perizinan dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal yang mendapat perhatian ekstra dari BKPM RI antara lain Peningkatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Dan untuk percepatan Pelaksanaan Berusaha maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau *OSS*) dimana dengan diterapkannya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha tanpa memakan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit.

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan pelayanan DPMPSTP Kota Prabumulih serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan DPMPSTP Kota Prabumulih berdasarkan Sasaran Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi SumSel	Permasalahan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan, belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya tim teknis.	SDM yang berkompeten di bidang perizinan belum memadai, masih kurang optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, unsur tim teknis belum optimal dalam menjalankan tugasnya.	Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BKPM, kemajuan IT yang berkembang dengan pesat.
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha /penanam modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya promosi tinggi</li> <li>2. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor</li> <li>3. Kurangnya koordinasi dengan OPD sehingga fasilitasi kerjasama/kemitraan UMKM belum optimal</li> <li>4. Belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan yang belum komprehensif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya anggaran mengenai Promosi,</li> <li>2. Belum disusunnya Blueprint dan informasi data peluang investasi Kota Prabumulih,</li> <li>3. Koordinasi antar OPD terkait belum maksimal, belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan belum komprehensif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka <i>co sharing</i> untuk pelaksanaan promosi penanaman modal</li> <li>2. Kerjasama dengan OPD yang membidangi dan membina UMKM</li> </ol>

					3. Penyusunan Perda mengenai RUPM, serta bekerjasama dengan OPD terkait untuk melaksanakan pengumpulan data mengenai potensi unggulan daerah.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan sasaran renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih diantaranya adalah Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta kurangnya penggunaan dan pemahaman IT (*Information Technology*); belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal; belum optimalnya sinergitas OPD dan tim teknis; dan belum semua kewenangan OPD di bidang perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP Prabumulih yang disebabkan oleh masih adanya kepentingan sektoral; masih kurangnya koordinasi dalam bidang perencanaan baik dalam bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal yang disebabkan oleh ketidakseragaman institusi penanaman modal di kabupaten/kota; Implementasi hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara baik di lapangan hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas koordinasi di bidang penanaman modal; sarana dan prasarana yang dimiliki belum representatif karena terbatasnya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang	Investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya investasi pada sektor manufaktur	Terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan	Jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Selatan terutama di Palembang merupakan pasar yang potensial
2.	Pusat Kegiatan Perekonomian, Pemukiman dan Perumahan berada di Pusat Kota Prabumulih	Masih terpusatnya kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan penduduk dan perdagangan dan jasa di pusat kota	Luas Kota Prabumulih yang relatif kecil 434,5 KM <sup>2</sup> , pengembangan hanya berada di pusat saja	Adanya bidang pertanian, perkebunan milik rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra, luas lahan untuk pembangunan kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan dapat dikembangkan di luar pusat kota.

Permasalahan layanan DPMPSTSP Kota Prabumulih berdasarkan telaah dan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatas investasi pada sektor manufaktur, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota; infrastruktur dasar yang masih kurang memadai di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang disebabkan faktor geografis yang kurang mendukung serta sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan keterbatasan luas lahan yang ada.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPMPSTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Sumatera Selatan agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Adanya investasi di Sumatera Selatan di sektor industri manufaktur akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Sumatera Selatan di sektor primer yaitu: pertanian, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Adanya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian pencemaran
4.	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Adanya industri di Sumatera Selatan sehingga memerlukan energi yang cukup besar	Banyaknya potensi sumber daya alam yang terbarukan di Sumatera Selatan sehingga tidak hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan

Faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada DPMPSTSP Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi di Kota Prabumulih;
2. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih;

3. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Aparatur, baik di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi;
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan cepat, mudah, murah dan transparan.
2. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/APBN maupun dari Pihak Swasta dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari telaahan di atas, maka isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih yaitu:

1. Upaya peningkatan jumlah investor di Kota Prabumulih
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPSTP Kota Prabumulih

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan peraturan berlaku dengan gambaran kondisi dan situasi lingkungan hidup Kota Prabumulih (pengolahan data program/kegiatan tahun 2013-2018).

Secara umum untuk capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk periode 2013-2018 dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target dokumen perizinan yang dikeluarkan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih meningkatkan minat para calon investor dalam melakukan penanaman modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menginventarisir isu-isu strategis tersebut yang mencakup:

1. Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.
2. Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi
4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi
6. Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan
7. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perijinan
8. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPMPTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi DPMPTSP sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria**

No.	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	20	10	10	10	10	10	70
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik dibidang penanaman modal maupun bidang perijinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	20	10	20	10	15	10	85
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	15	10	15	10	15	15	80

4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan	20	10	20	10	15	25	100
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	20	10	20	10	15	25	100
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	20	10	20	10	15	15	90
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	20	10	20	10	15	25	100
8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	10	5	15	10	10	10	60

Ada 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih selama kurun waktu Tahun 2018-2023. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra BKPM, maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari: memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi DPMPTSP ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 4,5 dan 7 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

**Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis**

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	70	6,36
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	85	7,72
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	80	7,27
4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan	100	9,09
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	100	9,09
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	90	8,18
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	100	9,09
8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	60	5,45

Dari 8 (delapan) isu strategis DPMPSTSP Kota Prabumulih, terdapat 5 isu dengan rata-rata skor tertinggi yaitu: (1) belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (2) belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (3) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (4) Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan dengan rata-rata skor sebesar 8,18; (5) Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan rata-rata skor sebesar 7,72.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih**

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih berdasarkan kriteria yang mudah dipahami. Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih.

#### **4.1.1 Tujuan**

Dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi serta visi dan misi RPJMD Kota Prabumulih 2018-2023, maka dirumuskan tujuan DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

#### **4.2.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 3 (tiga) sasaran jangka menengah, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih dan indikatornya disajikan pada Tabel TC 25.

**Tujuan Dan Sasaran Menengah Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih**

**Tabel TC.25**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke..					
					2018 (Kondisi Awal)	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPSTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih	1. Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	B	BB	BB	A
			2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	0	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,6	84	84	88	88	88
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana DPMPSTSP Kota Prabumulih melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Visi: Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima dan Berkualitas Tahun 2023</b>			
<b>Misi (1): Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas dan Berprestasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPSTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan manajemen kinerja sesuai standar</li> <li>• Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja</li> </ul>	Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPSTSP
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan perizinan</li> <li>• Implementasi SOP</li> <li>• Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat</li> </ul>	Peningkatan, Penguatan dan Pemantapan kualitas pelayanan
<b>Misi (4): Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.</b>			
Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Peningkatan promosi penanaman modal</li> <li>• Perbaikan sistem dan pelayanan perizinan</li> <li>• Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal</li> <li>• Penyusunan kebijakan kemudahan perizinan investasi</li> </ul>

Tabel TC. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS TAHUN 2023”

Misi :

1. Misi (1) : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Berkualitas dan Berprestasi
2. Misi (4) : Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Kerja/Berusaha, serta dengan Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan Industri Kreatif.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan manajemen kinerja sesuai standar</li> <li>- Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja</li> </ul>	Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan</li> <li>- Implementasi SOP</li> <li>- Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat</li> </ul>	Peningkatan, Penguatan dan Pemantapan kualitas pelayanan
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>- Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Peningkatan promosi penanaman modal</li> <li>- Perbaikan sistem dan pelayanan perizinan</li> <li>- Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Peluang Investasi Daerah yang Potensial</li> <li>- Peningkatan Perusahaan yang taat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online</li> <li>- Peningkatan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal</li> <li>- Penyusunan kebijakan kemudahan perizinan investasi</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Prabumulih, perlu ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dalam lima tahun. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah konkret DPMPTSP Kota Prabumulih untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, sebagaimana tersaji dalam tabel TC 27 yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

**Tabel TC. 27a**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Terlaksanannya Peningkatan Pengelolaan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan Kebijakan Internal DPMPPTSP Kota Prabumulih	Persentase rata-rata hasil pencapaian program dan kegiatan pada DPMPPTSP Kota Prabumulih	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Jumlah Layanan Administrasi /Operasional Kantor	100 %	733,690,000	100%	704,400,000	100%	813,000,000	100%	1,047,000,000	100%	1,048,000,000	100%	1,053,000,000					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah jasa surat-menyerurat (materai, perangk, dan benda pos lainnya)	977 bh	5,000,000	977 bh	5,000,000	977 bh	5,000,000	1000 bh	7,000,000	1000 bh	7,000,000	1000 bh	7,000,000	1000 bh	7,000,000	1000 bh	7,000,000	
					penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	7 STNK	5,000,000	7 STNK	6,000,000	7 STNK	6,000,000	8 STNK	6,000,000	8 STNK	7,000,000	8 STNK	7,000,000	8 STNK	7,000,000	8 stnk	7,000,000
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan DPMPPTSP	9 Org	51,700,000	9 Org	49,000,000	9 Org	49,000,000	9 Org	49,000,000	9 Org	49,000,000	9 Org	49,000,000	9 Org	49,000,000	9 org	49,000,000
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya kebutuhan pendukung kebersihan kantor	20 jenis	33,900,000	20 jenis	35,000,000	20 jenis	35,000,000	25 jenis	50,000,000	30 jenis	50,000,000	35 jenis	50,000,000	35 jenis	50,000,000	35 jenis	50,000,000
					Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	Jumlah alat tulis kantor untuk mendukung tugas-tugas DPMPPTSP	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000	48 jenis	60,000,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	50,000,000	7 jenis	50,000,000	7 jenis	50,000,000	7 jenis	60,000,000	7 jenis	60,000,000	7 jenis	60,000,000	7 jenis	60,000,000	7 jenis	60,000,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi,air dan listrik	Dana untuk sarana komunikasi, air dan listrik	2 rekening	94,800,000	2 rekening	92,400,000	2 rekening	150,000,000	2 rekening	200,000,000	2 rekening	200,000,000	2 rekening	200,000,000	2 rekening	200,000,000	2 rekening	200,000,000

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhnya kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan dan jaringan listrik	11 jenis	6,000,000	11 jenis	8,000,000	11 jenis	8,000,000	11 jenis	10,000,000	15 jenis	10,000,000	20 jenis	10,000,000	20 jenis	10,000,000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	10 jenis	34,290,000	10 jenis	29,000,000	10 jenis	30,000,000	10 jenis	30,000,000	10 jenis	30,000,000	10 jenis	30,000,000	10 jenis	30,000,000
				Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	145 x	350,000,000	61x	250,000,000	65 x	300,000,000	75 x	450,000,000	75 x	450,000,000	75 x	450,000,000	75 x	450,000,000
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	66 x	26,000,000	268 x	100,000,000	268 x	100,000,000	268 x	100,000,000	268 x	100,000,000	268 x	100,000,000	268 x	100,000,000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 jenis	17,000,000	4 jenis	20,000,000	4 jenis	20,000,000	4 jenis	25,000,000	4 jenis	25,000,000	4 jenis	30,000,000	4 jenis	30,000,000
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</b>	<b>100 %</b>	<b>274,100,000</b>	<b>100%</b>	<b>425,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>425,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>720,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>835,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,305,000,000</b>	<b>100%</b>	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Servis, Sperl, DLL)	12 jenis	77,000,000	9 jenis	77,000,000	9 jenis	80,000,000	9 jenis	85,000,000	9 jenis	90,000,000	9 jenis	90,000,000	9 jenis	90,000,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mobil dan 5 motor	400,000,000	1 mobil dan 5 motor	400,000,000
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	80,800,000	11 jenis	250,000,000	3 jenis	100,000,000	15 jenis	200,000,000	15 jenis	250,000,000	15 jenis	300,000,000	15 jenis	300,000,000
				Pengadaan Software, Hardware Komputer	Tersedianya komputer/laptop, printer dll	-	-	-	-	3 jenis	140,000,000	4 jenis	150,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000
				Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	25,000,000	4 jenis	20,600,000	4 jenis	30,000,000	4 jenis	30,000,000	4 jenis	30,000,000	4 jenis	35,000,000	4 jenis	35,000,000

				Pemeliharaan Rutin/berkala hardware/software/jaringan komputer	Terpeliharanya software, hardware dan jaringan komputer	1 jenis	27,300,000	2 jenis	13,000,000	2 jenis	10,000,000	3 jenis	15,000,000	3 jenis	15,000,000	3 jenis	20,000,000	3 jenis	20,000,000
				Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya sistem informasi pelayanan perizinan	1 org	64,000,000	1 org	65,000,000	1 org	65,000,000	1 org	65,000,000	1 org	65,000,000	1 org	65,000,000	1 org	65,000,000
				Pengelolaan Website DPMP TSP	Tersedianya data informasi di website DPMP TSP							2 org	85,000,000	3 org	90,000,000	3 org	95,000,000	3 org	95,000,000
				Pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan	Terintegrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OPD Terkait							10 instansi	90,000,000	10 instansi	95,000,000	10 instansi	100,000,000	10 instansi	100,000,000
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	<b>100 %</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100%</b>	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			50 stel	30,000,000	60 stel	40,000,000	60 stel	50,000,000	60 stel	60,000,000	60 stel	70,000,000	60 stel	70,000,000
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian olah raga bagi aparaturnya	50 stel	20,000,000	50 stel	20,000,000	60 stel	35,000,000	60 stel	35,000,000	60 stel	40,000,000	60 stel	45,000,000	60 stel	45,000,000
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>170,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>165,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>680,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>810,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>795,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
				Peningkatan kinerja kapasitas sumber daya aparaturnya dalam pelayanan perizinan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan terciptanya layanan perizinan yang maksimal			16 org	40,000,000	20 org	45,000,000	20 org	45,000,000	20 org	50,000,000	20 org	50,000,000	20 org	50,000,000
				pelatihan dan pendidikan aparaturnya di bidang perizinan dan penanaman modal	Tercapainya pelayanan perizinan penanaman modal							30 x	450,000,000	30 x	500,000,000	30x	550,000,000	30x	550,000,000

				Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	pegawai tim teknis penyelenggaraan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan			62 org	70,000,000								62 org	70,000,000	
				Peningkatan pengembangan kinerja kapasitas aparatur DPMPPTSP	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur DPMPPTSP					12 org	70,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Training)	Meningkatnya Kinerja ASN dan Karyawan DPMPPTSP			42 org	60,000,000					50 org	70,000,000			50 org	70,000,000
				Peningkatan SDA Aparatur ASN Melalui Program Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)	Audit Eksternal ISO 9001:2015 untuk meningkatkan Kinerja ASN dan Karyawan DPMPPTSP					60 org	50,000,000	60 org	55,000,000	60 org	60,000,000	60 org	65,000,000	60 org	65,000,000
				Pengendalian Pelaksanaan & Pemantauan Penanaman Modal	Peningkatan Kualitas SDM di bidang Dalak							4x	60,000,000	4x	60,000,000	4x	60,000,000	4 x	60,000,000
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas	100 %	42,000,000	100%	49,000,000	100%	56,000,000	100%	56,000,000	100%	70,000,000	100%	85,000,000	100%	0
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Tersusunnya laporan LAKIP yang sesuai dan baik	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Tersusunnya Laporan keuangan semester yang tepat	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya dan laporan keuangan akhir tahun yang tepat	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Tersusunnya data dan RKA yang sesuai dengan kebutuhan anggaran bagi	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000

				Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD	Tersusunnya data dan RKA Perubahan yang sesuai dengan kebutuhan anggaran bagi SKPD	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) yang baik	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan LPPD	Tersusunnya laporan penyelenggara pemerintah daerah yang rapi dan tepat	1 dok	5,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	6 dok	10,000,000
				Penyusunan RENSTRA DPMPSTP	Tersusunnya Rencana Strategis Lima Tahun Kedepan	1 dok	7,000,000								1 dok	15,000,000	2 dok	15,000,000	
2	Terlaksanannya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang oleh Pelayanan Perizinan / Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas di Kota Prabumulih	Meningkatkan Penyelenggaraan PTSP yang Akuntabel dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>80.89</b>	<b>0</b>	<b>80.89</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>230,000,000</b>	<b>82.5</b>	<b>748,000,000</b>	<b>83</b>	<b>760,000,000</b>	<b>83.5</b>	<b>770,000,000</b>	<b>83.5</b>	<b>0</b>
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					2 dok	50,000,000	2 dok	50,000,000	2 dok	50,000,000	2 dok	50,000,000	8 dok	50,000,000
				Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat	Tersusunnya & adanya tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat					1 dok	5,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	4 dok	10,000,000
				Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	Fasilitasi Tim Teknis dan Tim Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan					65 org	150,000,000	65 org	150,000,000	65 org	150,000,000	65 org	150,000,000	65 org	150,000,000
				Pengadaan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perizinan, Pengembangan Kinerja dan Penanaman Modal	Terpenuhinya buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan						50 buku	20,000,000	50 buku	25,000,000	60 buku	25,000,000	60 buku	25,000,000	

				Rakor Penataan Perundang-undangan tentang Sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Persyaratan Perizinan/non perizinan	Terlaksananya a Rakor Sistem Perizinan/Non Perizinan					60 org	60,000,000	60 org	60,000,000	60 org	60,000,000	60 org	60,000,000
				Sosialisasi Sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP) persyaratan perizinan dan non perizinan se-kota Prabumulih	Terlaksananya a Sosialisasi dan banyaknya masyarakat yang mengetahui SOP dan Persyaratan Perizinan					100 org	80,000,000	100 org	80,000,000	100 org	80,000,000	100 org	80,000,000
				Penyuluhan Advokasi Pelayanan Perizinan bagi Aparatur dan Masyarakat Pengguna Izin	Tercapainya Masyarakat yang sadar akan pengurusan perizinan			50 org	10,000,000	50 org	20,000,000	50 org	20,000,000	50 org	20,000,000	50 org	20,000,000
				Sosialisasi Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tercapainya Wajib Pajak Terhadap Perizinan					150 org	70,000,000	150 org	70,000,000	150 org	70,000,000	150 org	70,000,000
				Peyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Buku SOP dan Standar Pelayanan			100 buku	15,000,000	100 buku	20,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000
				Pembinaan dan Fasilitasi Satgas Percepatan Berusaha	Tercapainya Pengawasan Pemantauan dan Hambatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Berbagai SEKTOR					40 org	100,000,000	40 org	100,000,000	40 org	100,000,000	40 org	100,000,000
				Fasilitasi tim Teknis	Tersedianya Operasional kegiatan tim teknis dalam percepatan perizinan dan non perizinan					65 org	100,000,000	65 org	100,000,000	65 org	100,000,000	65 org	100,000,000
				Sosialisasi Perizinan dengan Pelaksana Teknis di 6 Kecamatan Kota Prabumulih	Terlaksananya a Sosialisasi untuk Pelaksana Teknis Perizinan					100 org	70,000,000	100 org	70,000,000	100 org	80,000,000	100 org	80,000,000

3	Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang oleh Pelayanan Perizinan / Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas di Kota Prabumulih	Meningkatnya Jumlah Investor berskala Nasional	Jumlah PMDN	<b>Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	Persentase Ketercapaian dan Kesesuaian antara Rencana yang Telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan program dan kegiatan	100,0 0%	0	100,0 0%	75,000,000	100,0 0%	95,000,000	100,0 0%	425,000,000	100,0 0%	450,000,000	100,0 0%	480,000,000	100,0 0%	0
				Evaluasi Data Realisasi Penanaman Modal	Peningkatan Kualitas Data Informasi Perizinan/Non perizinan Penanaman Modal						1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	3 laporan	30,000,000	
				Koordinasi dan Kerjasama dengan Pelaku Usaha	Peningkatan Monitoring, Pemantauan & Pengawasan PM						4 laporan	40,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	12 laporan	50,000,000	
				Pembinaan kewajiban perusahaan penanaman Modal di Kota Prabumulih	Jumlah Perusahaan yang menanamkan modalnya di Kota pbm				10 perusahaan	20,000,000	35 Perusahaan	50,000,000	40 Perusahaan	50,000,000	45 Perusahaan	60,000,000	45 perusahaan	60,000,000	
				Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah dan Instansi Terkait	meningkatkan realisasi investasi kota prabumulih						6 Kec	35,000,000	6 Kec	40,000,000	6 Kec	45,000,000	6 kec	45,000,000	
				Penyusunan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	tercapainya informasi database perizinan dan non perizinan yang akurat dan terintegritas				1 dok	15,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	25,000,000	4 dok	25,000,000	
				Pengendalian Laporan kegiatan penanaman modal /LKPM	tersedianya data perkembangan investasi dan laporan realisasi investasi pertahun						1 Dok	35,000,000	1 Dok	40,000,000	1 Dok	45,000,000	3 dok	45,000,000	
				Peningkatan kualitas pelaporan penanaman modal kota prabumulih	sosialisasi mengenai peraturan terbaru di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal						100 perusahaan	100,000,000	150 perusahaan	100,000,000	150 perusahaan	100,000,000	150 perusahaan	100,000,000	
				Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Tertaksanannya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian PMDN/PMA						30 perusahaan	55,000,000	30 perusahaan	60,000,000	30 perusahaan	65,000,000	30 perusahaan	65,000,000	

				Pemantauan dan Pengawasan PMDN dan PMA di Kota Prabumulih	Nilai Realisasi PM yang terpantau di Wilayah Kota Prabumulih					4 laporan	60,000,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	60,000,000
				penyusunan dan pembuatan buku SOP dan standar pelayanan	Buku SOP dan Standar Pelayanan		100 buku	25,000,000										100 buku	25,000,000
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		2 dok	20,000,000										2 dok	20,000,000
				Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat	Tersusunnya & adanya tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat		1 dok	5,000,000										1 dok	5,000,000
				Penyuluhan Advokasi Pelayanan Perizinan bagi Aparatur dan Masyarakat Pengguna Izin	Tercapainya Masyarakat yang sadar akan pengurusan perizinan		75 org	25,000,000										75 org	25,000,000
4	Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang oleh Pelayanan Perizinan / Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas di Kota Prabumulih	Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah	Realisasi Investasi	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional/Internasional</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>140,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>280,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>508,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>524,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
				penyelenggaraan pameran investasi	Ikut serta dalam pameran investasi di wilayah Prov. Sumatera Selatan		1 pameran	100,000,000		2 pameran	190,000,000	2 pameran	200,000,000	2 pameran	200,000,000	2 pameran	200,000,000	9 pameran	200,000,000
				Pembuatan / Pencetakan Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	Tersedianya bahan informasi mengenai penanaman modal				4 jenis	25,000,000	4 jenis	30,000,000	4 jenis	35,000,000	4 jenis	40,000,000	4 jenis	40,000,000	
				pembuatan leaflet dan booklet investasi penanaman modal	penyebaran potensi melalui booklet dan leaflet		150 booklet dan leaflet	10,000,000										150 booklet dan leaflet	10,000,000
				penyebaran informasi perizinan dan penanaman modal	tersebarannya informasi pembangunan	1 stand pameran	35,000,000	2 pameran	30,000,000									2 pameran	30,000,000
				Pemutahiran data dan inventarisasi potensi daerah	Tercapainya pemutahiran data investasi di kota prabumulih							1 dok	28,000,000	1 dok	29,000,000	1 dok	30,000,000	3 dok	30,000,000

				Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal melalui Pameran dan Mobil Hias	Tersebar nya Informasi Pembanguan melalui pameran mobil hias					2 pameran	40,000,000	2 pameran	50,000,000	2 pameran	60,000,000	2 pameran	60,000,000	8 pameran	60,000,000
				Pengembangan, Pelaksanaan dan Sarana Prasarana Promosi DPMPSTP	Bertambah nya Kualitas SDM di bidang Promosi Penanaman Modal							6 x pertemuan	50,000,000	6 x pertemuan	50,000,000	6 x pertemuan	50,000,000	6 x pertemuan	50,000,000
				Penyusunan dokumen peluang investasi	Tersedianya informasi investasi PM di Kota Prabumulih				50 buku	25,000,000	100 bk	50,000,000	100 bk	50,000,000	100 bk	50,000,000	100 bk	50,000,000	50,000,000
				Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tercapainya kerjasama antara Investor dengan Pemerintah Kota						60 org	100,000,000	70 org	100,000,000	80 org	150,000,000	80 org	150,000,000	150,000,000
				<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional/Internasional</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>370,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>685,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>510,000,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>535,000,000</b>	<b>100,00%</b>	
				Penyusunan Produk Hukum Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM) di Kota Prabumulih	Tersedia Peraturan Walikota Prabumulih Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM) Kota Prabumulih				1 dok	20,000,000								1 dok	20,000,000
				Fasilitasi kerjasama antara dunia usaha dengan UMKM	Terjalinn nya MoU dan terlaksanannya fasilitasi antara Dunia Usaha dengan UMKMK di Kota Prabumulih							1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	100,000,000	3 laporan	100,000,000
				Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kota Prabumulih	Terlaksanannya Sosialisasi RUPM di Kota Prabumulih							50 orang	100,000,000					50 orang	100,000,000

				Revisi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kota Prabumulih	Tersusunnya Revisi RUPM dan Tersedianya Revisi Peraturan Walikota Prabumulih Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM) Kota Prabumulih						60 buku (20 NA, 20 Laporan akhir, 20 Eksekutif) dan 1 dok	200,000,000						60 buku (20 NA, 20 Laporan akhir, 20 Eksekutif) dan 1 dok	200,000,000
				Pendataan Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Terkumpulnya data Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih						1 dok	80,000,000						1 dok	80,000,000
				Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Tersedianya Peta Pengembangan penanaman Modal										1 dok	100,000,000		1 dok	100,000,000
				Bimtek/workshop pembinaan perusahaan penanaman modal di kota prabumulih	laporan LKPM laporan kegiatan penanaman modal			25 org	25,000,000									25 org	25,000,000
				forum group discussion (FGD) mengenai sebaran sektor unggulan kota prabumulih	Fasilitasi kerjasama strategis penanaman modal dan pelayanan perizinan			15 org	40,000,000									15 org	40,000,000
				Penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Perda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal					2 dok	250,000,000							2 dok	250,000,000
				Fokus Group Discription (FGO) dengan Instansi terkait	Meningkatnya Investor						20 org	70,000,000	20 org	70,000,000	20 org	70,000,000	20 org	70,000,000	70,000,000
				Penyusunan Produk Hukum penanaman Modal	Tersedianya peraturan Daerah dikota Prabumulih									1 dok	150,000,000			1 dok	150,000,000
				Pendataan Pemberdayaan usaha dikota prabumulih	Tersedianya data pemberdayaan usaha di Kecamatan Kota Prabumulih					1 Kec	50,000,000	1 Kec	50,000,000	2 Kec	50,000,000	2 Kec	50,000,000	6 kec	50,000,000

				Sosialisasi Kemitraan antara Dunia Usaha di Kota Prabumulih	Terlaksananya sosialisasi antara dunia usaha dengan UMKMK Kota Prabumulih										100 org	100,000,000	100 org	100,000,000	
				Kajian Perencanaan Penanaman Modal	Tersedianya data Kajian Perencanaan Penanaman Modal							1 Laporan	50,000,000				1 laporan	50,000,000	
				kajian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Tersedianya data Kajian Perencanaan Penanaman Modal			1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan (ABT)	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 laporan	200,000,000		
				Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi					30 org	55,000,000	30 org	60,000,000	30 org	65,000,000	30 org	65,000,000		
<b>TOTAL</b>									<b>1,104,790,000</b>		<b>1,679,000,000</b>		<b>2,509,000,000</b>		<b>4,954,000,000</b>		<b>5,107,000,000</b>		<b>5,718,000,000</b>

Prabumulih, 26 April 2019  
Kepala DPMPTSP,



Rozali, S.Sos., M.Si  
Pembina TK.I/IV/b  
NIP. 19660821986031006

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

**Tabel TC. 27b**

KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
Kode Program	Program	Hasil Program / Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah (Meliputi Sarana dan Prasarana, Personil, Metode Kerja, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Penganggaran, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Standarisasi, dan Pengelolaan Informasi)	x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	50,000,000	
											2. Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPPTSP				1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000		
											3. Jumlah Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPPTSP			1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	40,000,000	
					X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	50,000,000	
					X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	50,000,000	
					X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPPTSP	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan	50,000,000	
					X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPPTSP	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan	50,000,000	
					X	XX	01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPPTSP dalam 1 Tahun	1 Tahun	4,613,779,390	1 Tahun	5,075,157,329	1 Tahun	5,582,673,062	3 Tahun	15,271,609,781
					X	XX	01	2.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan DPMPPTSP	6 Orang	41,400,000	7 Orang	42,000,000	7 Orang	42,000,000	2 Orang	125,400,000
					X	XX	01	2.02	05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun DPMPPTSP	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	3 Laporan	40,000,000

				X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semester DPMPSTSP	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	3 Laporan	40,000,000
				X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada DPMPSTSP	2 Orang	9,600,000	2 Orang	10,800,000	2 Orang	10,800,000	6 Orang	31,200,000
				X	XX	01	2.05	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64 Stel	35,000,000	64 Stel	40,000,000	64 Stel	45,000,000	192 Stel	120,000,000
				X	XX	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2. Jumlah pakaian olah raga bagi aparaturnya	64 Stel	25,000,000	64 Stel	30,000,000	64 Stel	35,000,000	192 Stel
				X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Kemampuan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur ASN melalui Diklat Tentang Perizinan			12 Orang	90,000,000	12 Orang	90,000,000	24 Orang	180,000,000
				X	XX	01	2.05	09		2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengetahuan dan Kinerja Aparatur Pelayanan melalui <i>Excellent Frontline Services</i> .			15 Orang	50,000,000	15 Orang	70,000,000	30 Orang	120,000,000
				X	XX	01	2.05	09		3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Audit Eksternal Lanjutan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam rangka meningkatkan Kualitas layanan dan kinerja ASN /karyawan DPMPSTSP.			64 Orang	65,000,000	64 Orang	70,000,000	128 Orang	135,000,000
				X	XX	01	2.05	09		4. Jumlah Sumber Daya Aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mengikuti Diklat BKPM RI			4 Orang	50,000,000	4 Orang	60,000,000	8 Orang	110,000,000
				X	XX	01	2.05	09		5. Jumlah Peserta yang Mengikuti <i>In House Training</i> dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur DPMPSTSP			64 Orang	100,000,000	64 Orang	100,000,000	128 Orang	200,000,000



				X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	8 Jenis	50,000,000	8 Jenis	60,000,000	8 Jenis	70,000,000	24 Jenis	180,000,000
				X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Jenis Surat Kabar atau Media Massa dalam 1 tahun			4 Jenis	20,000,000	4 Jenis	20,000,000	8 Jenis	40,000,000
										2. Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Mengenai Perizinan dan Penanaman Modal			100 Buku	20,000,000	150 Buku	30,000,000	250 Buku	50,000,000
										3. Jumlah Buku Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur DPMPSTP			100 Buku	20,000,000	150 Buku	30,000,000	250 Buku	50,000,000
				X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	52 Jenis	60,000,000	52 Jenis	60,000,000	52 Jenis	60,000,000	156 Orang	180,000,000
				X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	200 Kali	250,000,000	230 Kali	300,000,000	240 Kali	350,000,000	670 Kali	900,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Mobil	250,000,000	1 Mobil	250,000,000	2 Mobil	500,000,000
				X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel			5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000	10 Jenis	100,000,000
				X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	28,000,000	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	60,000,000	14 Jenis	138,000,000
				X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000	10 Jenis	100,000,000
				X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000	10 Jenis	100,000,000
				X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000	10 Jenis	100,000,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat-menyerurat (materai dan benda pos lainnya)	2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	5,000,000	6 Jenis	15,000,000
					X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Telepon, Internet dan Listrik dalam 1 tahun	2 Rekening (24 rekening)	100,000,000	2 Rekening (24 rekening)	100,000,000	2 Rekening (24 rekening)	100,000,000	6 Rekening (72 Rekening)	300,000,000
					X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis	25,000,000	4 Jenis	30,000,000	5 Jenis	40,000,000	12 Jenis	95,000,000
										Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		2 Jenis	20,000,000	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,000,000	8 Jenis	80,000,000
					X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor DPMPSTP dalam 1 Tahun	4 Orang	30,000,000	7 Orang	54,000,000	7 Orang	54,000,000	18 Orang	138,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	7 STNK	6,000,000	7 STNK	6,000,000	7 STNK	6,000,000	21 STNK	18,000,000
										Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Servis, Sperlpart, DLL)		4.840 Liter	85,000,000	4.840 Liter	85,000,000	4.840 Liter	85,000,000	14.520 Liter	255,000,000
					X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 Jenis	50,000,000	4 Jenis	50,000,000	8 Jenis	100,000,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Pendataan UMKM di Kecamatan-Kecamatan di Kota Prabumulih	1 Kecamatan	15,000,000	2 Kecamatan	50,000,000	2 Kecamatan	50,000,000	5 Kecamatan	115,000,000
											2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Mengenai UMKM dan Dunia Usaha	30 Orang	35,000,000	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	90 Orang	135,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Peluang Investasi di Kota Prabumulih dan Potensi Unggulan	46 Orang	50,000,000	40 Orang	75,000,000	40 Orang	75,000,000	126 Orang	200,000,000
											4. Jumlah Dokumen Pembuatan Master Plant+Blue Print, Detail Engineering Desain (DED) dan Fasibility Study (FS)			1 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	650,000,000

											Peluang Investasi Kota Prabumulih Serta Penyusunan Standar Prosedure Operational Penanaman Modal								
x.xx.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	03	2.01	01	<b>Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal</b>	Jumlah Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	3 Jenis	25,000,000	3 Jenis (100 Booklet, 100 Leaflet, 1 Video)	35,000,000	3 Jenis (100 Booklet, 100 Leaflet, 1 Video)	40,000,000	9 Jenis	100,000,000
					2	18	03	2.01	02	<b>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Jumlah Pameran Investasi di Wilayah Prov. Sumatera Selatan (Pameran INFRADA SUMSEL EXPO)	1 Pameran	110,000,000	1 Pameran	110,000,000	1 Pameran	120,000,000	3 Pameran	340,000,000
											2. Jumlah Pameran Pembangunan dan Karnaval Mobil Hias dalam Rangka HUT Kota Prabumulih	2 Pameran	40,000,000	2 Pameran	45,000,000	2 Pameran	50,000,000	6 Pameran	135,000,000
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Jumlah Izin yang diterbitkan	<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	2	18	04	2.01	01	<b>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non Perizinan			8 Orang	90,000,000	8 Orang	100,000,000	16 Orang	190,000,000
					2	18	04	2.01	02	<b>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</b>	1. Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPPTSP Kota Prabumulih	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000	6 Laporan	120,000,000
											2. Evaluasi dan Monitoring Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan			4 Triwulan	15,000,000	4 Triwulan	20,000,000	8 Triwulan	35,000,000
					2	18	04	2.01	03	<b>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan</b>	Dokumen Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4 Laporan	12,000,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000	8 Laporan	102,000,000

					2	18	04	2.01	04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</b>	Jumlah Pemberian Insentif bagi Tim Teknis dalam Percepatan Proses Perizinan dan Non Perizinan	26 Orang	90,000,000	30 Orang	135,000,000	30 Orang	150,000,000	86 Orang	375,000,000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	05	2.01	01	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Monitoring/Pemantauan Penanaman Modal	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	70,000,000	12 Laporan	160,000,000
					2	18	05	2.01	02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	1. Jumlah Buku Panduan LKPM Manual			100 Buku	35,000,000	120 Buku	45,000,000	220 Buku	80,000,000
										<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	2. Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Kota Prabumulih	20 Perusahaan	20,000,000	40 Perusahaan	50,000,000	60 Perusahaan	65,000,000	120 Perusahaan	135,000,000
										<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Mengenai Peraturan Terbaru di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			40 Orang	30,000,000	50 Orang	40,000,000	90 Orang	70,000,000
					2	18	05	2.01	03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian PMA/PMDN	2 Laporan	20,000,000	4 Laporan	55,000,000	4 Laporan	65,000,000	10 Laporan	140,000,000
										<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Realisasi Investasi Kota Prabumulih Melalui Kerja Sama dengan Instansi Terkait			50 Perusahaan	35,000,000	60 Perusahaan	45,000,000	110 Perusahaan	80,000,000

2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Penanaman Modal	<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	06	2.01	01	<b>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	1. Pengelola data informasi di website DPMPSTP	1 Aplikasi	73,000,000	10 Orang	73,000,000	10 Orang	73,000,000	20 Orang (1 Aplikasi)	219,000,000
											2. Buku Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kota Prabumulih			24 Buku	38,000,000	24 Buku	49,000,000	48 Buku	87,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik			50 Orang	35,000,000	60 Orang	45,000,000	110 Orang	80,000,000
<b>JUMLAH</b>												<b>6,061,779,390</b>		<b>8,546,957,329</b>	<b>9,982,473,062</b>	<b>24,591,209,781</b>			

Prabumulih, 27 Oktober 2020

KEPALA DINAS



*A. Zahedi, S.Pd., MM*  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196305011988031005

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

**Tabel TC. 27C**

Kode Program	Program	Hasil Program / Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	2022		2023			
								Target	(Rp)	Target	(Rp)		
X XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP	X XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	32,000,000		
		X XX 01 201 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	8,000,000			
		X XX 01 201 03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	8,000,000			
		X XX 01 201 04			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	8,000,000			
		X XX 01 201 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	23,000,000			
		X XX.01.202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	5,126,006,721	84 Orang	5,582,673,062
							X XX 01 202 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22,200,000	1 Dokumen	53,280,000
			X XX 01 202 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	8,000,000		
			X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	8,000,000		
		X XX.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	X XX 01 203 08	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,800,000	1 Laporan	10,800,000		
		X XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		X XX 1 205 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	2 Paket	64,000,000		
					X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	6 Orang	75,000,000		
					X XX 01 205 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	225 Orang	50,000,000		
		X XX.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	1 Paket	10,000,000	
						X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	1 Paket	20,000,000	
						X XX 01 206 03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
						X XX 01 206 04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,999,600	1 Paket	50,000,000	
						X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	1 Dokumen	20,000,000	
						X XX 01 206 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	41,789,000	1 Paket	60,000,000	
				X XX 01 206 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000		

Kode Program	Program	Hasil Program / Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	2022		2023	
								Target	(Rp)	Target	(Rp)
			XXX1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	XX 01 207 06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	37 Unit	30,000,000
					XX 01 207 08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	7 Unit	60,000,000
					XX 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	1 Unit	50,000,000
			XXX1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	5,000,000
					XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70,079,250	1 Laporan	100,000,000
					XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,040,000	1 Laporan	70,000,000
					XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	100,000,000
			XXX01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	XX 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	54,998,000	7 Unit	100,000,000
					XX 01 209 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	13 Unit	15,000,000
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Potensi Peluang Investasi	2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 18 2 202 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Strategi Promosi Investasi	2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 18 3 201 1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Video Investasi	10,000,000	-	-
					2 18 3 201 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	3 Dokumen	170,000,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 18 4 201 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	10,000,000	50 Kegiatan Usaha	22,500,000
					2 18 4 201 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	3,000,000	80 Orang	5,000,000
					2 18 4 201 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	48 Kegiatan Usaha	15,000,000	-	-
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 18 5 201 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	214,006,000	20 Kegiatan Usaha	20,000,000
					2 18 5 201 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	146,150,000	30 Pelaku Usaha	30,000,000
					2 18 5 201 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	20,000,000
2.18.06	PROGRAM PENGELOAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 18 6 201 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	94,000,000
<b>JUMLAH</b>									<b>6,225,568,571</b>		<b>8,002,253,062</b>

Prabumulih, 24 Maret 2022

KERALA DINAS



**A. Zehedi, S.Pd., MM**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196305011988031005

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan *review* terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih ditunjukkan sebagaimana dalam tabel TC 2.8 berikut:

**Tabel 7.1**

**TC 2.8 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Urusan Penanaman Modal</b>										
1	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Rupiah (Milyar)	2,6	42,99	10	50	75	100	125	125
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>										
1	Nilai SAKIP	Predikat	-	C	CC	B	BB	BB	A	A
2	Persentase Tidak Lanjut Temuan Hasil Penganasan	Persen (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,96	81,6	84	84	88	88	88	88

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan pelaksana DPMPSTSP Kota Prabumulih. Alokasi anggaran atau pendanaan program dan kegiatan dalam Renstra ini masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan, tetapi tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran Perangkat Daerah ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Renstra ini dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPSTSP Kota Prabumulih sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan diimplementasikannya Renstra ini diharapkan dapat tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang bermuara pada percepatan proses pencapaian Visi dan Misi Kota Prabumulih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Prabumulih, 24 Maret 2022

KERALA DINAS,



A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005